

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut dialog Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada ASEAN CPA pertama yang diadakan di Nusa Dua Bali (dikutip dari CNBC Indonesia 16 Oktober 2019) yaitu menjelaskan bahwa “Indonesia harus meningkatkan kualitas Pendidikan dalam bidang akuntansi, standar dan kebijakan mengenai mobilitas akuntan profesional”. Akuntansi yang kita kenal sekarang tidak hanya akuntansi bisnis atau sektor swasta, tetapi juga akuntansi sektor publik.

Akuntansi dalam sektor publik juga memiliki sebuah peran dan tanggungjawab dalam menyusun serta menyajikan sebuah laporan keuangan, menurut Mia (2016:2) akuntansi dalam sektor publik memainkan peran yang penting dalam penyusunan sebuah laporan keuangan dan merupakan bagian dari bentuk pelaksanaan tanggung jawab kepada publik. Peran akuntansi dalam sebuah laporan keuangan memiliki makna yaitu sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan mengkomunikasikan sebuah informasi yang dapat digunakan dan bermanfaat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan serta dapat menilai kinerja dalam sebuah organisasi.

Olehkarena itu pada era digitalisasi saat ini tentu semua bidang dalam akuntansi perlu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan baik, khususnya dalam akuntansi sektor publik. Menurut Andriani dalam Mahaputra (2014:231) instansi pemerintah dalam situasi saat ini harus lebih meningkatkan kualitas atas

laporan keuangan sehingga dapat mengimbangi laju dalam bidang akuntansi, sehingga para pengguna informasi khususnya masyarakat sangat megarapkan instansi pemerintahan yang bersih dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi. Olehkarena itu pemerintah di daerah juga memiliki kewajiban untuk mempublikasikan informasi dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini tentu harus memperhatikan standar akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Yusniyar (2016:101) dalam mengelola keuangan daerah yang baik, sistem akuntansi pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan bersih (*clean government*), yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah pentingnya mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab. Dalam hal ini tentu perlu adanya kesadaran serta kerjasama dari semua pihak di dalam lingkungan instansi pemerintahan terkait sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih.

Dalam mewujudkan laporan keuangan yang memiliki kualitas terbaik tentu ada kriteria dalam laporan keuangan seperti yang disebutkan Yusniyar (2016:105) menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan biasanya memiliki empat dimensi yaitu andal, artinya informasi dalam laporan tersebut memang mencerminkan keadaan saat ini. Kemudian relevan, artinya informasi yang dihasilkan memang memenuhi kebutuhan. Selanjutnya dapat dibandingkan, artinya informasi tersedia pada saat informasi tersebut dibutuhkan. Selain itu yang terakhir adalah dapat dipahami, artinya informasi yang dihasilkan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Adapun berdasarkan observasi awal di lapangan pada tahun 2020 di Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), hampir setiap bulan terjadi keterlambatan terkait pengiriman laporan bulanan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja (Satker) di Polda Jabar. Laporan bulanan tersebut biasanya segera dikirim ke Bidang Keuangan apabila Satuan Kerja (Satker) tersebut kembali diingatkan dengan pemberitahuan melalui telepon kepada satuan kerja (Satker) terkait. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kinerja Bidang Keuangan terkait tepat waktu dalam menghasilkan laporan keuangan dan juga bisa mempengaruhi keefektifan penyerapan anggaran.

Hal ini juga diungkapkan menurut Indeks Tata Kelola Polda Jawa Barat tahun 2015, Kepolisian Daerah Jawa Barat memiliki beberapa permasalahan yang penting menyangkut sumber daya manusia yang masih harus ada peningkatan dalam hal kompetensi, penyerapan dan keefektifan anggaran dalam hal sarana, dan prasarana. Adapun dalam hal penyerapan anggaran masih belum merata karena ada sebagian yang sudah cukup baik namun ada pula yang masih kurang baik. Begitu pula dengan transparansi anggaran di beberapa satuan kerja (Satker). Kurangnya efektivitas terkait penyerapan anggaran yang masih perlu ditingkatkan juga menjadi materi evaluasi yang penting dalam situasi yang akan datang.

Oleh karena itu pentingnya pemahaman serta implementasi tata Kelola pemerintahan (*Good Governance*) perlu ditingkatkan seperti yang dijelaskan menurut Reydonnyzar (2019:56) mengenai istilah *governance* itu sendiri merupakan pemerintahan dalam suatu kegiatan, seperti dalam hal pengelolaan, kemudian pengarahan, pembinaan, serta penyelenggaraan, kemudian merujuk

kepada sebuah instansi. Sehingga dalam hal membangun tata kelola, istilah *good governance* dapat memiliki arti yang luas.

Dalam mewujudkan *good governance* yang baik, menurut Yusniyar (2016:104) dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik termasuk kedalam dua pengertian, seperti nilai yang melekat pada harapan masyarakat kemudian tingkat kompetensi masyarakat dalam mencapai tujuannya seperti menjadi individu yang mandiri, berkelanjutan dan merasakan keadilan sosial. Dalam menciptakan hal ini tentu pentingnya kepercayaan masyarakat itu sendiri terhadap sebuah pemerintahan dan harus bisa menyerap informasi dengan baik sehingga tidak mudah terperangkap kedalam informasi yang menyesatkan atau *hoax*.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan ada 5 dari prinsip *Good Governance* yaitu terdiri dari akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan. Sehingga untuk meningkatkan *good governance* perlu benar-benar menerapkan prinsip ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yusniyar (2016:111) menyimpulkan bahwa dalam menerapkan prinsip *good governance* dengan baik maka menjadi semakin baik pula kualitas laporan keuangan di Pemerintah Aceh. Keadaan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam *good governance* dapat menciptakan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Kemudian penelitian selanjutnya Miranda (2018:568) dengan judul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Akuntansi Keuangan

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado”, memberi kesimpulan bahwa variabel pertama nya yaitu X 1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang disampaikan dalam latar belakang, maka penulis ingin melakukan penelitian dan terlebih dahulu penulis membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian secara rinci yang dirangkum dalam identifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana *good governance* pada Bidang Keuangan Polda Jabar?
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Bidang Keuangan Polda Jabar?
3. Bagaimana pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada Bidang Keuangan Polda Jabar?

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka selanjutnya mengenai maksud serta tujuan penelitian yang diusulkan adalah sebagai berikut :

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Adapun maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah memperoleh data-data dan informasi terkait *Good Governance* sehingga untuk mengetahui seperti apa pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. *Good governance* pada Bidang Keuangan Polda Jabar.
2. Kualitas laporan keuangan pada Bidang Keuangan Polda Jabar.
3. Pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada Bidang Keuangan Polda Jabar.

## **1.4 Kegunaan Dalam Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yang akan diuraikan sebagai berikut :

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta informasi yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Selain itu, penulis mengharapkan dalam penelitian ini bisa menambah ilmu serta teori yang berhubungan, karena seiring berjalannya waktu terkadang banyak teori-teori yang dipelajari tidak sama dengan di lapangan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bidang Keuangan Polda Jabar, sebagai bahan kajian serta evaluasi mengenai pentingnya pemahaman mengenai *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Peneliti, yaitu dengan penelitian ini menjadi memperluas ilmu dan wawasan berpikir di bidang akuntansi pemerintahan secara nyata.
3. Bagi IKOPIN, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan referensi skripsi berkaitan dengan informasi serta berguna untuk masa yang akan datang.

## **1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bidang Keuangan Polda Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No.748 Kota Bandung.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

1. Fase Persiapan : Februari-April 2020
2. Fase Pengumpulan Data : Mei-Juli 2020
3. Fase Pengolahan Data : Juli- September 2020
4. Fase Penulisan Skripsi : Oktober-November 2020